



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 15 TUHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PENDUKUNG BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER PADA SATUAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan diberikan imbal jasa berupa penghasilan dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

17. Peraturan Bupati ...

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Bupati adalah Bupati Karo
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.
5. Satuan Pendidikan Negeri adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

9. Pendidik Honorer adalah Guru yang mengajar pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo.
10. Tenaga Kependidikan Honorer adalah Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bertugas pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo.
11. Jasa Pendukung adalah Honorarium tambahan yang diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer.

Pasal 2

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman dalam pembayaran dan pertanggungjawaban Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer bertujuan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo.
- (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan urutan:
 - a. masa Kerja;
 - b. usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer dialokasikan untuk Pembayaran Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang bertugas pada TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo.
- (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang bertugas pada TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang per 1 (satu) bulan.
- (2) Tata Cara pembayaran dan pertanggungjawaban Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang bertugas pada TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerima Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 14 APRIL 2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PEMBAYARAN
HONORARIUM JASA PENDUKUNG BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERIDI
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020

**PETUNJUK TEKNIK PEMBAYARAN HONORARIUM
JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada khususnya. Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial.

Kondisi Guru di Kabupaten Karo untuk beberapa tahun terakhir ini, antara jumlah yang pensiun dan meninggal dunia lebih banyak dibanding dengan pengangkatan/penempatan baru. Hal ini mengakibatkan sebagian besar sekolah negeri kekurangan guru. Mengingat kebutuhan sekolah untuk menjamin proses pembelajaran tetap berlangsung pengangkatan tenaga honorer tidak dapat dihindari.

Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dinyatakan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan(Pasal 39 Ayat 1). Tenaga Kependidikan terdiri atas: 1) Tenaga Perpustakaan, 2)Tenaga Laboratorium, 2)Teknisi Sumber Belajar, 3) Tenaga Administrasi, 4) Psikolog, 5) Tenaga Kebersihan, 6) Keamanan, dan 7) Tenaga dengan sebutan lain. Keberadaan tenaga

kependidikan pada sekolah negeri di Kabupaten Karo sebagian besar berstatus honorer hal ini terjadi karena formasi untuk jabatan ini tidak dilakukan pengangkatan.

Gaji tenaga honorer dianggarkan sekolah paling banyak 15% dari total dana BOS yang diterima sekolah. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019). Dampak dari aturan ini maka gaji yang diterima tenaga honorer berkisar antara 250.000,- s.d 1.000.000,- per bulan, sesuai dengan dana yang tersedia. Sehingga semakin banyak tenaga honorer disuatu sekolah maka gaji yang diperoleh setiap tenaga honorer semakin kecil.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 28 tertulis Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Berdasarkan aturan ini Bupati Karo memungkinkan menetapkan kebijakan untuk menanggulangi kekurangan imbalan jasa yang diterima oleh tenaga honorer di sekolah. Hal ini diperjelas pada Pasal 29 ayat (2) huruf e, Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam: rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota.

Mengacu pada SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/674/KPTS/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2020, Besar upah minimum Kabupaten Karo ditetapkan Rp 3.070.354,- per bulan. Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima tenaga honor di sekolah dipandang kurang dari cukup serta perlu ditambah dari sumber penghasilan lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini Bupati Karo dan didukung Pokok Pikiran dari DPRD Kabupaten Karo pada Tahun 2018 menetapkan kebijakan berupa Pemberian Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Karo Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan melaksanakan pemberian bantuan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Karo. Untuk itu, agar pelaksanaan pemberian bantuan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan perundang-undangan perlu disusun Petunjuk

Teknis Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Karo.

B. Prinsip dan Etika

Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, adil dan akuntabel.

C. Tujuan

Pemberian Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang bertugas pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo;
2. Menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar tetap berjalan efektif pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo;
3. Meningkatkan kinerja dan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan honorer dalam melaksanakan tugas;
4. Meningkatkan komitmen dan tanggungjawab pendidik dan tenaga kependidikan honorer dalam mengemban tugas sebagai pendidik yang profesional;

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pemberian honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer (Non PNS) yang bertugas pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Karo dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) bulan yaitu terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2020.

E. Kriteria Calon Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Syarat dan ketentuan Calon Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;

c. Tidak pernah/sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran hukum dan atau tata tertib sekolah serta kode etik guru pada umumnya.

2. Persyaratan Khusus

Calon Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain memenuhi persyaratan umum juga memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Memiliki Ijazah minimal Strata Satu (S1)/D IV dan Akta Mengajar bagi Guru dan minimal Ijazah SMA/SMK bagi Tenaga Kependidikan, kecuali Tenaga Kebersihan dan Keamanan minimal SMP;
- b. Bertugas pada TK, SD dan SMP Sekolah Negeri di Kabupaten Karo dan Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan honorer minimal dari Kepala Sekolah tempat bertugas;
- c. Diusulkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan analisis kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah masing-masing dan aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Honorarium yang diterima dari Dana BOS besarnya dibawah upah minimum regional.

F. Penetapan Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan. Disamping memenuhi persyaratan, karena keterbatasan anggaran maka penetapan penerima ditentukan berdasarkan masa kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai tenaga honorer yaitu dari yang paling lama ke yang paling baru sebagai tenaga honorer. Apabila terdapat Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki masa kerjasama tetapi jumlah kuota tidak memungkinkan untuk ikut serta seluruhnya maka penetapannya didasarkan pada usia, yaitu dari usia yang tertua sampai usia yang paling muda. Penetapan penerima honorarium ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas Pendidikan.

BAB II
MEKANISME PEMBAYARAN HONORARIUM
JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Sumber Data

Data calon penerima adalah bersumber dari data yang diajukan oleh Kepala Sekolah, yang didukung oleh bukti administrasi sebagai persyaratan.

B. Sumber dan Alokasi Dana

Pembiayaan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersumber dari dana APBD Kabupaten Karo Tahun 2019 sesuai dengan DPA SKPD Dinas Pendidikan, Nomor: 60/DPA-BPKPAD/2019, tanggal 28 Januari 2019. Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per orang, per bulan selama 12 (dua belas) bulan sejak Januari s.d Desember 2019.

C. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pembayaran

1. Dinas Pendidikan mengumumkan, menginformasikan dan menyampaikan adanya Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di Kabupaten Karo.
2. Kepala sekolah mengajukan nama calon penerima yang memenuhi syarat umum dan khusus dengan melampirkan:
 - a. SK Pengangkatan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan honorer;
 - b. Surat Keputusan Pembagian tugas mengajar pada tahun berkenaan;
 - c. Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Pengawas Sekolah;
 - d. Daftar Hadir guru pada bulan berkenaan yang diketahui oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
 - e. Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) dari masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan penerima yang diketahui oleh Kepala Sekolah sesuai formulir 1;
 - f. Pakta Integritas dari kepala sekolah yang bersangkutan sesuai formulir 2.
3. Kepala Sekolah bertanggung jawab mutlak terhadap pengajuan nama-nama calon penerima yang diusulkannya;

4. Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi berkas calon penerima;
5. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan kemudian akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Karo sebagai penerima honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Apabila pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima mengundurkan diri atau berhalangan tetap, dapat digantikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan lain yang belum ditetapkan sebagai penerima. Penggantian penerima ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Formulir 1

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan : (isi sesuai dengan SK Pengangkatan Saudara)
 Unit Kerja :
 Kabupaten : Karo

1. Menyatakan benar telah melaksanakan tugas sebagaisesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah
2. Kelengkapan berkas pendukung usulan pembayaran Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer adalah benar dan sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya.
3. Kerugian Negara akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan saya atas kelengkapan berkas sebagai bukti keaktifan pelaksanaan tugas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Kepala Sekolah

....., 2019
 Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....
 NIP.

Formulir 2

KOP SEKOLAH

Pakta Integritas Kepala Sekolah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

1. Tenaga Honorer di sekolah tempat Saya bertugas terdiri dari :

a. Pendidik/Guru (diurutkan berdasarkan masa kerja)

No	Nama Pendidik/Guru	TMT	Masa Kerja	Usia	Jumlah Jam Tatap Muka
1					
dst					

b. Tenaga Kependidikan (diurutkan berdasarkan masa kerja)

No	Nama Tenaga Kependidikan/Non Guru	Tugas/Jabatan	TMT	Masa Kerja	Usia	Jumlah Jam Kerja
1						
Dst						

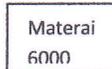
2. Tenaga Honorer (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tersebut di atas melaksanakan tugas secara aktif sesuai dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

3. Kerugian Negara akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan saya atas data-data tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **SAYA**, dan bersedia menerima sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas Kepala Sekolah ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah,

.....2019
Yang Membuat Pernyataan



.....
NIP.

.....

D. Mekanisme Pencairan Bantuan

Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Anggaran (PA) menyalurkan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui transfer rekening bank. Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibayarkan setelah pendidik dan tenaga

kependidikan melaksanakan tugas, sesuai dengan ketersediaan dana pada kas Dinas Pendidikan.

E. Penghentian Pembayaran

Pembayaran Honorarium jasa pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dihentikan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia akan dihentikan pada bulan berikutnya;
2. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun akan dihentikan pada bulan berkenaan.
3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.
4. Tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif 5 (lima) hari dalam satu bulan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.
5. Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan atau dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN SANKSI

A. Pelaporan

Dinas Pendidikan melalui Kasubag Keuangan membuat laporan yang berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Fotocopy SP2D penarikan bantuan;
3. Fotocopy Rekening Koran Buku Bank Dinas Pendidikan yang menunjukkan pembayaran dimaksud telah masuk ke rekening masing-masing guru penerima;

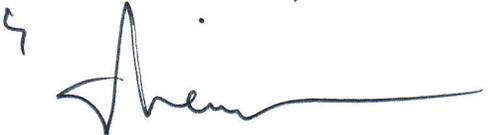
B. Pemantauan

Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk melihat pelaksanaan program pemberian Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berjalan dengan baik, tepat tujuan dan sasaran.

C. Sanksi

Sanksi diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, jika hasil pemantauan dan laporan dari Aparat Pengawas Fungsional baik internal maupun eksternal dan dilakukan verifikasi ternyata ditemukan ada manipulasi data, maka Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib mengembalikan seluruh Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan kesalahan tersebut.

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA